

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi negara berkembang, Indonesia senantiasa berupaya menyempurnakan pembangunan nasional demi menciptakan kesejahteraan masyarakat, pada masa pajak berfungsi menjadi tumpuan primer buat mendanai aneka macam inisiatif serta proyek pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung kepada pembayar dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak berperan sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional dan daerah, serta alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Jalil dkk., 2024). Masyarakat dengan pendapatan per kapita yang tinggi dapat dikategorikan sebagai kelompok yang sejahtera. Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan suatu negara adalah tingkat kemiskinan yang rendah (Shandy Jannifer Matitaputty dkk., 2020).

Peran pajak semakin penting dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, terutama di tingkat regional. Fungsi pajak terbagi menjadi dua aspek penting yang saling melengkapi, Pertama, pajak berfungsi sebagai fungsi anggaran, di mana pendapatan pajak digunakan untuk mendanai belanja pemerintah dan pembangunan, termasuk infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui fungsi ini, pajak menjadi sumber utama untuk memastikan implementasi program pemerintah dan pembangunan nasional secara

berkelanjutan. Selain itu, pajak juga memainkan peran penting dalam fungsi redistribusi dan regulasi ekonomi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Modernisasi membawa perubahan besar dalam penerimaan pajak Indonesia, terutama dalam mempermudah administrasi dan pengumpulan data. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak menjadi lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Akses yang lebih luas ke informasi melalui internet juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak mereka. Hal ini memudahkan wajib pajak dalam memperoleh informasi terkait kewajiban perpajakan, regulasi, serta tata cara yang perlu dipatuhi. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan tumbuhnya pemahaman dan kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban pajak (Putri, 2023), sehingga turut berkontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Dengan kebijakan pajak yang tepat, Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat mendistribusikan kekayaan dan mengurangi disparitas ekonomi melalui program-program sosial yang beragam, sehingga menciptakan keadilan ekonomi yang merata di semua tingkatan masyarakat. Dengan dana yang berasal dari pajak, Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat membangun infrastruktur dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan daerah, terkhususnya di Kabupaten Kebumen.

Bersamaan dengan penerapan otonomi daerah pada 1 Januari 2001, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola pendapatan dan belanja

daerah secara independen. Hal ini mewajibkan pemerintah daerah untuk kreatif dalam menemukan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal, termasuk pajak daerah, untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana transfer berasal pemerintah sentra. Selain itu, langkah ini dilakukan menggunakan inovasi teknologi dalam proses pengumpulan pajak di Indonesia, misalnya melalui pengembangan aplikasi mobile. Provinsi Jawa Tengah telah meluncurkan New Sakpole sebagai cara untuk mempermudah proses penyampaian dan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kini dapat dilakukan secara online.

Inovasi ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan transaksi dengan lebih efisien dan praktis, tanpa perlu mengunjungi kantor Samsat secara langsung. Layanan *New Sakpole* berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah, karena mempercepat proses administrasi, mengurangi antrian, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan penggunaan teknologi ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan pajak di daerah dan membantu meningkatkan pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Pajak daerah terdiri dari provinsi dan kabupaten atau kota. Di mana masing-masing memiliki kekuasaan dalam pengumpulan serta pengaturan. Salah satu elemen krusial dalam pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 12 UU No. 1 Tahun 2022, pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor., sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

dikenakan setiap kali terjadi perubahan kepemilikan kendaraan. Dua jenis pajak ini dikelola melalui kantor bersama SAMSAT, yang melibatkan kerjasama antara PT Jasa Raharja (Persero), Dinas Pendapatan Provinsi Daerah, dan Polri. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak kendaraan, Kabupaten Kebumen telah menerapkan sistem pajak progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendapatan Provinsi Daerah dan Polri memainkan peran yang sangat penting. Dasar dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Setiap kali terjadi transaksi jual beli kendaraan, kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor pun muncul secara otomatis. Di Kabupaten Kebumen, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data penerimaan PKB menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2019 hingga 2023.

Tabel 1. 1 Penerimaan PKB Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2019	Rp 94.624.300.000	Rp 98.797.997.450	104%
2020	Rp 111.200.000.000	Rp 98.412.438.325	89%
2021	Rp 114.565.000.000	Rp 107.006.779.000	93%
2022	Rp 128.450.531.000	Rp 127.280.771.125	99%
2023	Rp 140.282.826.000	Rp 131.166.844.275	94%
TOTAL	Rp 589.122.657.000	Rp 562.664.830.175	96%

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Kebumen selama periode 2019 hingga 2023 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata realisasi sebesar 93%. Pada tahun 2019, realisasi PKB tercatat sebesar 104% dari target, mencerminkan pencapaian yang sangat baik, kemungkinan didorong oleh kondisi ekonomi yang stabil dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam menjadi 89%, yang sangat mungkin disebabkan oleh dampak pandemi *coronavirus* terhadap perekonomian masyarakat. Tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan, dengan realisasi mencapai 93%, meskipun target belum tercapai secara optimal karena adaptasi terhadap sistem pembayaran digital New Sakpole masih berlangsung. Pada tahun 2022, realisasi meningkat menjadi 99% seiring dengan diterapkannya kebijakan insentif berupa pembebasan sanksi administrasi dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022, yang terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan pajak. Sementara itu, pada tahun 2023, persentase realisasi tercatat sebesar 94%, mengindikasikan adanya respons positif masyarakat terhadap program kemudahan pembayaran pajak melalui pelayanan langsung di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) maupun secara daring. Secara keseluruhan, meskipun tren realisasi cenderung meningkat, capaian kumulatif selama lima tahun masih belum mencapai 100%, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan PKB di Kabupaten Kebumen. Meskipun terdapat perbedaan antara target dan realisasi dalam beberapa tahun, upaya pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menjaga stabilitas pendapatan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) tetap berlangsung dengan baik.. Hal ini juga didukung oleh data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Kebumen disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 1. 2 Penerimaan BBNKB Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2019	Rp 62.613.000.000	Rp 70.038.371.000	112%
2020	Rp 75.934.033.000	Rp 46.542.012.025	61%
2021	Rp 65.788.000.000	Rp 58.695.489.000	89%
2022	Rp 75.285.642.000	Rp 58.760.764.000	78%
2023	Rp 76.671.447.000	Rp 60.428.426.000	79%
TOTAL	Rp 356.292.122.000	Rp 294.465.062.025	83%

Sumber : data diolah, 2025

Tabel 1.2 realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Kebumen menunjukkan fluktuasi antara target dan realisasi selama tahun 2019-2023.. Pada tahun 2019, realisasi BBNKB mencapai 112% dari target, menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengubah nama kendaraan serta efektivitas layanan yang diterapkan oleh pemerintah. Namun, pada tahun 2020, persentase realisasi menurun drastis menjadi 61%, yang disebabkan oleh dampak ekonomi dari pandemi *coronavirus* yang menghambat transaksi kendaraan bermotor. Pada tahun 2021, realisasi BBNKB meningkat menjadi 89%, didukung oleh kebijakan insentif yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, persentase realisasi kembali menurun menjadi 78%. Meskipun terdapat kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II dalam provinsi maupun luar provinsi sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022, target masih belum tercapai. Pada tahun 2023, realisasi BBNKB sedikit meningkat menjadi 79%, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya menyesuaikan strategi dalam menghadapi kondisi ekonomi yang ada, didukung oleh langkah-langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyederhanakan administrasi pajak kendaraan.

Secara keseluruhan, rata-rata realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2019 hingga 2023 adalah 83%. Data ini menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan teori manajemen pajak, pencapaian target pajak sangat bergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan insentif yang diterapkan, serta kemudahan proses administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak kendaraan dan penyederhanaan proses pergantian nama, termasuk layanan online, langkah ini bertujuan untuk mendorong peningkatan ketaatan wajib pajak dalam pelaksanaan proses balik nama kendaraan. Data ini menunjukkan bahwa pencapaian target pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kebijakan insentif, serta kemudahan proses administrasi yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan seperti pemberian insentif pajak kendaraan dan penyederhanaan proses pergantian nama melalui layanan online diharapkan dapat mendorong minat wajib pajak dalam menyelesaikan proses pergantian nama kendaraan.

Oleh karena itu, pencapaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama tahun 2019-2023 dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan

kebijakan pemerintah yang terus disesuaikan untuk meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Kebumen. Perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencerminkan adanya berbagai faktor yang berperan dalam optimalisasi pendapatan pajak daerah. Disamping itu, tunggakan pajak kendaraan bermotor serta keberadaan kendaraan dengan plat nomor luar Jawa Tengah yang masih beroperasi di wilayah Kebumen menjadi tantangan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Kebumen, masih banyak ditemukan kendaraan bermotor yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Berdasarkan catatan samsat kabupaten kebumen, pada 2024 terdapat 84.846 kendaraan bermotor di Kebumen menunggak pajak. Di 2023 tercatat 28.942 kendaraan telat pajak dengan potensi pendapatan senilai Rp 7,6 miliar. Sedangkan di tahun 2022 terdapat 16.148 kendaraan dan di tahun 2021 kendaraan telat pajak sebanyak 13.563 unit. Total potensi pendapatan dari dua tahun tersebut mencapai Rp 14,2 miliar.

Dengan potensi jumlah kendaraan yang besar, mengoptimalkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen dan mengurangi ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen juga menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 3 Penerimaan PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

TAHUN	PAJAK DAERAH	%	RETRIBUSI DAERAH	%	PENDAPATAN LAIN-LAIN	%
2019	Rp 169.459.903.976	20%	Rp 83.655.900	16%	Rp 3.325.935.975	24%
2020	Rp 145.482.107.545	17%	Rp 91.927.340	18%	Rp 1.243.921.300	9%
2021	Rp 166.462.519.325	19%	Rp 98.678.600	19%	Rp 2.638.824.700	19%
2022	Rp 186.816.633.555	22%	Rp 111.135.000	22%	Rp 3.912.601.100	28%
2023	Rp 192.334.483.250	22%	Rp 128.170.000	25%	Rp 2.993.129.700	21%
JUMLAH PENERIMAAN	Rp 860.555.647.651	100%	Rp 513.566.840	100%	Rp 14.114.412.775	100%

Sumber : data diolah, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen yang dikelola langsung oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, Pajak Daerah tercatat sebesar Rp. 169.459.903.976 atau memberikan kontribusi 20% terhadap total PAD, diikuti Retribusi Daerah sebesar Rp. 83.655.900 (16%) dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp. 3.325.935.975 (24%). Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan cukup signifikan pada seluruh komponen penerimaan. Pajak Daerah turun menjadi Rp. 145.482.107.545 (17%), Retribusi Daerah sebesar Rp. 91.927.340 (18%), dan Pendapatan Lain-Lain anjlok menjadi Rp. 1.243.921.300 (9%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, PAD mulai menunjukkan sedikit perbaikan. Pajak Daerah naik menjadi Rp. 166.462.519.325 (19%), Retribusi Daerah meningkat ke angka Rp. 98.678.600 (19%), dan Pendapatan Lain-Lain menjadi Rp. 2.638.824.700 (19%). Tren positif berlanjut di tahun 2022, di mana Pajak Daerah mencapai Rp. 186.816.633.555 (22%), Retribusi Daerah Rp. 111.135.000 (22%), dan Pendapatan Lain-Lain Rp. 3.912.601.900 (28%). Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan Pajak Daerah sebesar Rp. 192.334.483.250 (22%), Retribusi Daerah meningkat

tajam menjadi Rp. 128.170.000 (25%), dan Pendapatan Lain-Lain mencapai Rp. 2.993.129.700 (21%).

Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir, total penerimaan PAD Kabupaten Kebumen dari Pajak Daerah mencapai Rp. 860.555.647.651, Retribusi Daerah sebesar Rp. 513.566.840, dan Pendapatan Lain-Lain sejumlah Rp. 14.114.412.775. Kontribusi masing-masing komponen menunjukkan bahwa Pajak Daerah konsisten sebagai tulang punggung PAD, meskipun perannya sempat menurun di masa pandemi. Kenaikan signifikan pada tahun 2022–2023 mencerminkan keberhasilan implementasi inovasi kebijakan, termasuk digitalisasi layanan pajak melalui sistem New Sakpole serta pemberian insentif seperti diskon denda dan pembebasan BBNKB, yang secara keseluruhan mendukung pemulihan PAD di Kabupaten Kebumen.

Pemulihan PAD didorong oleh beberapa faktor, termasuk inovasi kebijakan dan digitalisasi layanan pajak. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah program insentif dari pemerintah daerah, seperti diskon denda keterlambatan pembayaran pajak serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Antusiasme masyarakat sangat tinggi, pada hari pertama pelaksanaan per tanggal 8 April 2025, jumlah wajib pajak melonjak hingga 250% dibanding hari biasa, dengan 3.439 kendaraan roda dua dan 199 kendaraan roda empat terlayani. Lonjakan ini menunjukkan efektivitas jangka pendek dari kebijakan tersebut.

Selain itu, implementasi layanan *New Sakpole* turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan proses pembayaran pajak. Modernisasi administrasi pajak ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan

pajak kendaraan bermotor, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi dengan meminimalkan transaksi tunai dan interaksi langsung antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Hingga 30 April 2025, penerimaan PKB yang masuk ke kas daerah tercatat sebesar Rp 15,6 miliar, masih jauh dari target tahunan. Kondisi ini menjadi fokus penting untuk diteliti lebih dalam, terutama faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerimaan PKB dan BBNKB, termasuk peran modernisasi administrasi pajak melalui aplikasi *New Sakpole* serta pengaruh kondisi ekonomi pascapandemi yang berdampak pada perilaku wajib pajak.

Modernisasi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan pajak kendaraan bermotor, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi dengan meminimalkan transaksi tunai dan face-to-face otoritas pajak dan wp. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat terus meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang disajikan dalam bentuk tugas akhir dengan topik : **"Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis terhadap masalah yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023?
2. Apakah pengaruh penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023?
3. Apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tujuan studi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023.
2. Menganalisis pengaruh penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023.
3. Menganalisis pengaruh penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dengan harapan mampu memberikan kontribusi akademik dalam bentuk pemahaman mengenai dampak penerimaan PKB dan BBNKB PAD di Kabupaten Kebumen selama periode 2019-2023.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji hubungan antara penerimaan pajak daerah, khususnya PKB dan BBNKB, dengan PAD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Individu: Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga dalam proses penelitian ilmiah, sekaligus memberikan pemahaman konkret mengenai pengelolaan PKB dan BBNKB yang berkaitan dengan peningkatan PAD.
- b. Bagi Instansi: Penelitian ini diharapkan turut menyumbang solusi efektif dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan PKB dan BBNKB guna meningkatkan PAD.
- c. Bagi Universitas: Hasil studi ini dapat dijadikan sumber rujukan dan bahan bacaan bagi mahasiswa, sekaligus menambah literatur tentang pajak daerah dan pad.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian, di mana masing-masing bagian memiliki beberapa subbagian. Pendekatan ini diambil untuk meningkatkan keteraturan dan sistematika dalam penelitian. Berikut adalah sistematika penulisan dari penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian pentingnya penerimaan PKB dan BBNKB dalam kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Kebumen. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta struktur penulisan untuk memberikan gambaran struktur penelitian secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Teori-teori yang mendasari penelitian disajikan dalam bab ini, termasuk konsep-konsep terkait PKB, BBNKB, PAD, dan pajak daerah secara umum. Selain itu, bab ini memuat ulasan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat argumen penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara variabel penelitian, serta hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori dan temuan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini, dibahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, tujuan, lokasi, dan durasi penelitian. Selain itu, dibahas tentang sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang

digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara PKB dan BBNKB dan PAD di Kabupaten Kebumen.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian disajikan dalam bab ini telah dianalisis, yang diikuti dengan pembahasan mendalam. Pembahasan ini menghubungkan hasil analisis dengan teori yang relevan serta menjawab rumusan masalah penelitian. Bab ini juga menggambarkan secara jelas pengaruh penerimaan PKB dan BBNKB terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kebumen dari tahun 2019-2023.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian disajikan dalam bab ini telah dilakukan, implikasi dari temuan penelitian, serta saran-saran yang diberikan kepada pemerintah daerah, peneliti selanjutnya, dan pihak terkait lainnya. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan pajak daerah, khususnya PKB dan BBNKB, untuk mendukung pengoptimalan PAD.